

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi di Indonesia saat ini sudah banyak mengalami kemajuan baik itu dibidang pertanian, industri dan masih banyak lagi, dengan teknologi yang dimiliki indonesia saat ini banyak memberikan dampak positif kepada masyarakatnya salah satu contohnya sudah banyak informasi-informasi dan pekerjaan yang mudah didapatkan hanya dengan via online. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di perkotaan akan mendapatkan dampak positifnya lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang masih tinggal dipedesaan bahkan tidak sedikit juga banyak penduduk Indonesia yang tinggal dipedalaman dan sulit mendapatkan informasi dengan cepat.

Daerah yang berada di Kabupaten Fak-fak Papua Barat mempunyai sejumlah potensi alam yang indah namun pengelolaannya yang masih serba manual menjadikan sulitnya berkembang daerah tersebut tidak hanya itu masyarakat yang tinggal disana pun tidak sedikit merupakan masyarakat yang mempunyai pendapatan sedikit. Desa tersebut memiliki jaringan yang tidak stabil sehingga membuat banyak penduduk ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui perhatian pemerintah mengenai masyarakat indonesia tentunya sangat tinggi, tidak jarang dalam sebuah desa akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak hanya untuk kepentingan

desanya melainkan untuk masyarakat desa yang memiliki perekonomian rendah juga dapat menerima bantuan.

Demi membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Pemerintah membuat suatu program yang diberi nama Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Namun pemilihan masyarakat atau kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan tersebut masih secara manual yang dilakukan oleh kepala desa yang bersangkutan dimana kriteria si penerima bantuan hanyalah kepala desa dan aparat desa yang mengetahui, sehingga membuat kesulitan oleh kepala desanya karena tiap tahunnya akan melakukan survey terus-terusan dikarenakan cara pemilihannya masih manual menggunakan buku dan pena yang hampir tiap tahun buku tersebut kadang hilang dan sobek. Penerima bantuan tersebut bisa mendapatkan bantuan di periode seterusnya dan bisa juga tidak lagi dapat menerima di periode selanjutnya, Sehingga perlu adanya system yang menampung data-data dari masyarakat yang nantinya akan digunakan lagi pada periode-periode berikutnya. Nantinya system tersebut akan diberikan kepada dinas social untuk dikelola.

Untuk proses penelitian ini penulis telah mengumpulkan data yang bersumber dari Kepala Desa Otoweri dan Kepala Desa Fior melalui perantara Bapak

Samidi selaku Kepala Sekolah SD INPRES OTOWERI. Pada Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Terdapat dua desa yang masuk dalam survey. Desa yang pertama yaitu Desa Otoweri yang berada di Distrik Tomage, dengan luas daerah : 14.825 Hektar, Jumlah penduduk = 322 Jiwa dengan 95 Kartu keluarga yang terdiri dari 146 laki-laki dan 176 Perempuan. Desa yang kedua yaitu Desa Fior yang berada di Distrik Arguni, dengan luas daerah = 12.900 Hektar, Jumlah penduduk 251 dengan 63 Kartu keluarga yang terdiri dari 141 jumlah laki-laki dan 110 jumlah perempuan. Pada desa Otoweri untuk pemilihan masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bantuan dana masih secara manual bukan hanya itu, di desa tersebut juga dalam melakukan berbagai kegiatan desa masih terbilang cukup jauh dari teknologi, Berbeda dengan desa yang kedua yaitu desa Fior yang bisa dibilang desanya sudah lebih maju dalam bidang teknologinya dibandingkan dengan desa Otoweri. Berdasarkan survey diatas penulis memutuskan untuk membangun sebuah system yang akan mempermudah dan membangun desa Otoweri dalam bidang teknologinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin membangun sebuah system yang mempermudah kerja Kepala desa dan aparat desa memilih masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dengan data yang tetap terjaga dan aman sehingga tidak perlu adanya survey terus-terusan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Sistem ini yaitu Sistem Pengambilan Keputusan, Pada Pemilihan Masyarakat Desa Yang Akan Menerima Bantuan Dari Pemerintah Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Berdasarkan Kriteria Penerima Berbasis WEB.

Diharapkan sistem tersebut dapat memberikan pemilihan yang terstruktur dari proses pengambilan keputusan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, pada penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan, Penentuan penerima bantuan pangan non tunai menggunakan metode analytical hierarchy process Berbasis WEB.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Implementasi *Analytical Hierarchy Process*, Process pada Pemilihan Masyarakat desa yang akan menerima bantuan berdasarkan penilaian Kriteria calon penerima oleh Kepala desa dan Aparat desa :

1. Kriteria di tentukan oleh kepala desa Otoweri dan Aparat desa.
2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan calon penerima adalah :
 - a. Pendapatan (Total pendapatan per bulan)
 - b. Pengeluaran (Presentase pengeluaran)
 - c. Kepemilikan Aset
 - d. Status tempat tinggal
 - e. Pendidikan tertinggi
 - f. Fasilitas Rumah

3. Masyarakat yang masuk dalam kategori orang tidak mampu, akan menjadi masyarakat yang terpilih dan akan menerima bantuan pangan non tunai setiap bulan
4. Menampilkan masyarakat terpilih pada proses penilaian Kriteria calon penerima, yang akan diterima oleh Dinas sosial

1.4 Tujuan Penelitian

1. Membuat web untuk mempermudah dalam proses pembagian penerima bantuan.
2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process. untuk perhitungan nilai kriteria untuk menentukan calon penerima bantuan pangan non tunai
3. Membangun system pendukung keputusan, penentuan calon penerima bantuan pangan non tunai menggunakan metode Analytical Hierarchy Process.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Pemilihan Objektif, Penilaian yang dilakukan setiap bulan secara langsung akan direkap setiap tahunnya kemudian dalam setahun akan diadakan penilaian lanjutan untuk menentukan si penerima pada tahun pertama akan terpilih lagi menjadi penerima pada tahun berikutnya.
2. Transparansi, Dilakukan penilaian tiap bulan terhadap kriteria supaya adanya transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat, transparansi yang ada adalah dengan adanya penilaian ini maka setiap penerima tiap tahunnya akan

merasa lebih baik dan mengerti. Data penilaian diperoleh dari aparat desa yang secara langsung memantau masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan lanjut usia.